

*Article*

# Toleransi itu Mahal, Tidak Setiap Orang Mampu dan Berani Membayarinya! : Berkaca pada Agenda *Costly tolerance*)

**Muhammad Nur Prabowo Setyabudi**

Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Indonesia ;  
email : mnurpsb@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF  
RELIGION AND SOCIETY  
Vol. 2, Issue 1, January 2023

ISSN 2962-7958

Page : 1-19

<http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJRS/article/view/45>

Copyright  
© The Author(s) 2023



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## **Abstract**

*This conceptual and interpretive article discusses again one of the conceptions of tolerance that deserves to be considered for its meaning and actualization, namely costly tolerance. This conception originating from the Christian tradition has a strong moral imperative to transform the practice of tolerance into a more perfect dimension as a virtue. In this lens, perhaps tolerance in a pseudo, shallow, and trite minimalistic degree, which often falls into an attitude of indifference or indifference that does not require any sacrifice, becomes meaningless, and does not deserve the word tolerance. The future of religions in Indonesia with its diversity amid a storm that always pulls the religious pendulum towards extremism, so it is still open to acts of crime in the name of religion. It is not sufficiently paid for by tolerance which is full of falsehood, and in this critical conception, will require a lot of sacrifices to be paid.*

## **Keyword**

*Costly tolerance, virtue, tolerance, dialogue, extremism*

### Abstrak

Artikel konseptual dan interperatif ini mendiskusikan kembali salah satu konsepsi toleransi yang patut untuk dipertimbangkan makna dan aktualisasinya, yaitu *costly tolerance*. Konsepsi yang berasal dari tradisi Kristiani ini memiliki imperatif moral yang kuat untuk mentransformasikan praktik toleransi pada matra yang lebih sempurna sebagai *virtue*. Dalam kaca mata ini, barangkali toleransi dalam kadar minimalis yang semu, dangkal, dan basa-basi, yang seringkali justru terjatuh dalam sikap *indifference* atau acuh tak acuh yang tidak membutuhkan pengorbanan apa-apa, menjadi kehilangan makna dan tidak patut menyandang kata toleransi. Masa depan agama-agama di Indonesia dengan keragamannya di tengah badai yang selalu menarik pendulum keagamaan ke arah ekstrimisme sehingga masih membuka diri bagi aksi kejahatan atas nama agama, tidak cukup dibayar dengan toleransi yang penuh kepalsuan, dan dalam pandangan konsepsi kritis ini, akan membutuhkan banyak pengorbanan yang perlu dibayar.

### Kata Kunci

*Costly tolerance, virtue, toleransi, dialog, ekstrimisme*

### Pendahuluan

Dalam situasi hubungan antar umat beragama di Indonesia yang belum sepenuhnya matang dalam berdemokrasi, kita masih djamak dihadapkan pada sebuah relasi yang timpang dalam praktik sosial keagamaan, misalnya, diskriminasi dan persekusi yang mengatasnamakan kelompok mayoritas agama terhadap minoritas agama tertentu. Dalam situasi konfliktual yang terkadang menjadi tragedi, dan tentu melanggar batas-batas toleransi paling minimal sekalipun, tidak setiap orang berani berdiri di garda depan seorang diri melawan aksi diskriminasi dan intoleransi, dan “menyuarakan kebenaran universal” dengan lantang tentang arti pentingnya menegakkan kerukunan dan perdamaian sebagai standar umum, terlebih melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang tertindas (*mustadhafin*) sebagai imperatif religius yang sangat profetik—untuk menyebut sedikit figur di Indonesia yang sukses dalam hal ini seperti Abdurrahman Wahid dan Buya Ahmad Syafii Maarif. Pembelaan mereka terhadap beberapa kasus diskriminasi, seperti pembelaan Gus Dur terhadap kelompok minoritas semisal kelompok Wahidiyah dan Konghucu, dan kritisisme Buya Syafii dalam menolak radikalisme, begitu monumental. Dalam ungkapan yang semi-kiasan: “Ya, toleransi itu –dalam bentuknya yang lebih sempurna– memang mahal, dan tidak setiap orang mampu dan berani membayarnya dengan keringat dan air mata!” Burhani, misalnya, menuliskan bagaimana Buya Syafii menghadapi kerasnya cercaan dan makian ujaran kebencian sebagian orang yang tuna adab kepada seorang pejuang toleransi yang tulus itu (Burhani, 2019; Ma’arif, 2022, hlm. 150). Tulisan ini saya maksudkan sebagai deskripsi dan refleksi filosofis terhadap ide yang relevan dengan kenyataan itu, yakni *costly tolerance* ¬(yang dalam artikel ini diterjemahkan secara harfiah sebagai toleransi yang mahal).

Tulisan ini disusun setelah menjadi partisipan salah satu acara yang sangat penting dalam membangun relasi toleransi antara Islam dan Kristen bertajuk “*The 6th Interfaith Dialogue: Promoting ‘Costly’ Tolerance: Challenges for States and Religious Communities*”, yang dihadiri hampir 100 orang di Wassenaar Netherlands pada 20 Juni 2019. Acara ini diprakarsai oleh Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations (NICMCR), sebuah konsorsium Indonesia-Belanda yang berfokus pada kegiatan penguatan toleransi, pendidikan agama, gender dan agama, dan ekologi dan agama. Ide *costly tolerance* sebagai spirit utamanya masih dan akan terus dikembangkan dan dielaborasi dalam konteks yang lebih spesifik untuk membangun hubungan antarumat beragama. Berbincang dengan beberapa pendukung ide tersebut, menimbulkan kesan kuat bahwa ide-ide utama dari *costly tolerance* sangat penting untuk dipertimbangkan bagi masa depan agama-agama. Ide tersebut, baik secara terminologi maupun signifikansi, juga sangat relevan untuk pengembangan kualitas toleransi Indonesia yang sepertinya masih belum cukup memuaskan khususnya jika diukur dari indikator ini. Tulisan ini, dalam beberapa hal, dapat disebut sebagai pembacaan dan komentar atas ide dan agenda tersebut.

### **Konsep dan Konsepsi Toleransi**

Konsep toleransi sering disebut sebagai konsep yang elusif, jauh dari kata terang, memiliki beragam konsepsi dan matra, dan berlaku dalam banyak konteks (Setyabudi, 2020b). Toleransi telah tumbuh dalam dinamika sejarah perkembangan demokratisasi dan hubungan moral dan politik antara agama dan negara. Ia seringkali dianggap sebagai bagian dari nilai dasar dalam kehidupan sosial dan politik modern, yang bersinggungan dengan problem hubungan filosofis antara otoritas negara dan warganegara, hubungan antara mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, pembatasan ruang publik dan ruang privat, perlindungan hak-hak individual, dan sebagainya (Macedo, 2017).

Sejak awal abad modern, risalah John Locke yang mengkritik otoritarianisme dalam tubuh agama, *A Letter Concerning Toleration*, misalnya, mula-mula berusaha menjadikan toleransi sebagai moralitas baru untuk mengikis dominasi doktrin-doktrin teologis yang berselingkuh dengan kepentingan-kepentingan politik kekuasaan. Sejak itu toleransi menjadi pilar utama yang beriringan dengan arus sekularisasi bagi ide tentang demokrasi yang berarti toleransi politik terkait bagaimana negara memperlakukan agama dan bagaimana, terutama, memisahkan urusan agama dan urusan politik.

Namun demikian, beberapa pemikir toleransi menyatakan bahwa meski belum dikemas dalam istilah modern “toleransi”, persoalan toleransi merupakan persoalan abadi setiap kebudayaan umat manusia yang hadir dalam setiap komunitas masyarakat, yang telah ada sejak zaman klasik sampai saat ini,

sebagaimana problem fundamental tentang keadilan yang selalu hadir dari masa ke masa. Selama di situ ada komunitas masyarakat yang beragam dan otoritas kekuasaan berlaku, maka problem toleransi ada di dalamnya (Forst, 2013).

Di era yang lebih belakangan, toleransi dimaknai dalam konteks yang lebih luas, tidak saja menjadi bagian dari diskusi agama, tetapi juga etnisitas dalam manifestasinya sebagai toleransi agama dan toleransi sosial, yang bersinggungan dengan hubungan antar-identitas agama dan etnis, penegakan hukum agama dan hukum adat, kebebasan beragama, ekspresi bahasa etnis, mengukur indeks intoleransi dalam beragama, dan lain sebagainya. Beberapa pemikir kritis seperti Herbert Marcuse (1997) bahkan mendiskusikan lebih jauh praktik klasik toleransi dalam konteks budaya yang lebih kritis, menyangkut kondisi masyarakat post-industrial yang 'arbitrer' dan semena-mena ke arah toleransi yang represif (*repressive tolerance*). Dengan demikian, toleransi menjadi isu penting yang tak lepas dibicarakan meliputi banyak aspek, baik politik, sosial-budaya, maupun keagamaan (Marcuse, 1997).

Secara umum, toleransi dimengerti dalam berbagai manifestasi bentuk yang dapat disebut "modus toleransi", antara lain: memberikan otoritas atau kekuasaan tertentu terhadap pihak lain; pengakuan dan penerimaan terhadap identitas kelompok berbeda; penghargaan terhadap kelompok lain yang kebetulan adalah minoritas; tidak melakukan sesuatu yang sebetulnya bisa memiliki kuasa untuk melakukan suatu hal; tidak menggunakan kesewenang-wenangan dan mau berkompromi untuk menyelesaikan suatu konflik; dan lain sebagainya. Sugiharto, juga, membagi aneka modus itu dalam kategori toleransi yang dangkal dan toleransi yang mendalam (Forst, 2013; Setyabudi, 2020b; Sugiharto, 2017).

Secara garis besar, setidaknya diskusi mengenai toleransi selalu dilihat dari dua sisi: pertama sudut pandang teologis, dan kedua sudut pandang non-teologis. Pendekatan pertama melihat toleransi sebagai bagian dari problem teologis dan mengaitkannya dengan praktik keagamaan, keyakinan agama, interpretasi terhadap kitab suci, dan politik keagamaan. Toleransi dikaitkan dengan kebebasan beragama dan sikap terhadap minoritas agama. Dalam hal ini, tindak intoleransi selalu dihubungkan dengan menguatnya kecenderungan paham konservatisme dan fundamentalisme beragama yang termanifestasi menjadi bentuk kekerasan, sehingga menciderai kebebasan beragama bagi kelompok tertentu.

Tanpa mengesampingkan pentingnya pendekatan teologis –sebagaimana akan ditunjukkan sebentar lagi–, aspek lain yang tak kalah penting untuk melihat toleransi adalah non-teologis yang tidak terlalu sensitif terhadap agama, melainkan melihat toleransi lebih sebagai bagian dari problem etis. Karena etika bersifat universal, maka toleransi dipandang sebagai praktik tindakan moral universal, berlatar belakang agama partikular apapun itu, terkait dengan, misalnya, sensitivitas sosial terhadap orang atau kelompok dari identitas berbeda, kemampuan pengendalian

diri untuk tidak melakukan intoleransi terhadap minoritas, baik sosial maupun agama. Intoleransi atau diskriminasi tidak hanya oleh kelompok minoritas agama, tapi juga dapat dialami oleh minoritas kelompok sosial, seperti dalam persoalan gender dan diskriminasi terhadap perempuan, kelompok dengan motif seksualitas berbeda, kelompok minoritas etnis dan imigran, pengidap penyakit kronis seperti HIV-AIDS, penyandang disabilitas, pembatasan hak terhadap kaum miskin yang dibatasi akses pendidikan dan kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam perspektif yang lain, toleransi juga bagian dari nilai-nilai etika religius, moralitas yang mengacu kepada ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip keagamaan yang supernatural. Namun dua sudut pandang itu, hemat penulis, saling melengkapi satu sama lain dan memang saling terkait satu sama lain.

### ***Costly tolerance* : Teologi Inklusif Menjadi Sumber Inspirasi bagi Toleransi Agama**

Berbeda dengan gagasan toleransi yang berasal dari alam pemikiran modern yang lebih sekular dalam iklim demokrasi liberal klasik, ide tentang "*costly tolerance*" justru terinspirasi dari alam pikiran teologi yang sangat religious, sebuah alam pemikiran teologi inklusif. Gagasan utama ini dikemukakan, antara lain, oleh Leo J. Koffeman, seorang profesor emeritus bidang *Church Polity* dan *Ekumenism* di Protestant Theological University. Gagasan *costly tolerance* diadopsi dan mendapatkan penerimaan melalui NICMCR (the Netherlands-Indonesia Consortium for Muslim-Christian Relations dan secara resmi dipublikasikan pada tahun 2018. Organisasi ini merupakan medium untuk mempromosikan dan memperkuat ide dan komitmen terhadap toleransi bagi para akademisi dan sarjana di Belanda dan Indonesia, khususnya menghadapi tantangan eksklusivisme agama di kedua negara.

Pada mulanya, Koffemann membahas tentang konsep otoritas kekuasaan dan kebebasan dalam konteks teologis dalam tubuh gereja dan banyak diwarnai oleh sejarah tradisi dalam gereja di Belanda. Ia menganalisis keputusan gereja di Reformed Church in Netherlands, dan pertimbangan kontekstualnya secara sosiologis. Ia menjadikan kasus pembaptisan bayi yang pernah terjadi pada tahun 1914 di Reformed Church in Netherlands. Koffemann mengkritik 'toleransi bersyarat' (*conditional character of toleration*) dan penuh karakter patronase dari dewan gereja, yang hanya diberikan pada situasi yang sangat spesifik, sebuah pembatasan terhadap kebebasan beropini dan berbicara. Ia kemudian mengemukakan pandangannya mengenai: "toleransi yang mahal".

Barangkali ada yang mempertanyakan. Mengapa toleransi harus diberi label "mahal"? Apa yang dimaksud "mahal" dalam konteks ini"? Mengapa harus "mahal"? Apa implikasi dari "mahal" disini? Beberapa definisi yang diberikan Koffemann tentang 'costly' dan terkait 'costlines': yang dimaksud dengan *costly* itu adalah: toleransi yang bukan murahan, yang tidak basa-basi, melainkan harus

didasari kesediaan untuk menanggapi dan mewujudkan toleransi dengan proses dan perjuangan yang sungguh-sungguh dan penuh komitmen, bahkan kalau perlu dengan pengorbanan.

“Penekanan pada artibut mahal (*cosliness*) dalam judul ini mengacu pada implikasi dari apa yang oleh Bonhoeffer cirikan sebagai ‘anugerah murahan’, yakni: pengampunan tanpa pertobatan, pembaptisan tanpa kemuridan. Anugerah memiliki harga; dan kesatuan, komitmen, dan kepatuhan juga memiliki harga, terutama yang berkaitan dengan implikasi etisnya” (Koffeman, 2016, hlm. 7).

Disini Koffeman mengutip analogi Bonhoeffer mengenai “*grace*” atau anugerah, bahwa untuk mendapatkan “*grace*” atau anugerah membutuhkan pengorbanan sebagai harga yang harus dibayar. Bonhoeffer menolak apa yang ia sebut “cheap grace” atau anugerah yang murahan, yaitu “pengabaran pengampunan tanpa tuntutan pertobatan, pembaptisan tanpa disiplin gereja, persekutuan/komuni tanpa pengakuan dosa. Karunia yang murah adalah karunia tanpa mengikuti ajaran, karunia tanpa salib, karunia tanpa Yesus Kristus. Kasih karunia semacam ini tidak mahal, dan tidak memiliki konsekuensi.” Bagi Bonhoeffer, karunia semacam ini tak bisa diterima. “Kasih karunia itu mahal. Ia mengubah hidup.” (Koffeman, 2018).

Toleransi yang mahal secara harfiah dapat dimengerti sebagai toleransi yang tidak murah mendapatkannya. Koffemann memberikan contoh tentang toleransi yang murah, seperti yang dilakukan beberapa pemimpin gereja pada masa di bawah rezim Nazi, dan memetic dari kisah Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog Lutheran Jerman yang terlibat aktif dalam gerakan perlawanan terhadap Nazisme. Sementara Bonhoeffer, yang membela minoritas dari perlakuan sewenang-wenang rezim Nazi pada masa itu, harus membayar mahal dengan nyawanya, dan harus menjadi martir untuk mempertahankan ajarannya:

“Kasih karunia yang murah itulah yang dilihat Bonhoeffer di Jerman masa Nazi. Penindasan terhadap orang Yahudi dan minoritas lainnya oleh rezim semakin meningkat, sedang sebagian besar pemimpin gereja tidak memiliki keberanian untuk berbicara menentang ketidakadilan dan kekerasan itu. Mereka lebih suka menyesuaikan diri dengan rezim Nazi atau bahkan secara eksplisit mendukung kebijakan Nazi. Bonhoeffer dieksekusi pada bulan April 1945 sebagai salah satu korban terakhir teror Nazi, saat ia belum berusia 40 tahun. Ia membayar harga tertinggi, yakni dengan nyawanya, karena baginya itu merupakan konsekuensi tak terelakkan dari komitmennya untuk mengikuti Yesus Kristus.” (Koffeman, 2016, hlm. 1).

Lebih lanjut Koffeman menjelaskan lebih eksplisit mengenai apa itu toleransi yang murah, meski beberapa teoritikus toleransi belakangan melihat toleransi semacam ini secara teoritis terjebak dalam sikap *indifference* dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai sebuah sikap toleransi, untuk tidak mengatakannya tidak toleran (Koffeman, 2018; Setyabudi, 2020a, hlm. 84):

“Toleransi yang murah ialah sikap acuh tak acuh. Toleransi yang murah ialah toleransi yang menghindari perjumpaan dengan ‘orang lain’. Bersikap toleran terhadap orang-orang dari agama lain—atau ras, atau preferensi seksual, atau jenis kategorisasi lainnya—itu gampang jika mereka hampir tak pernah kita jumpai, seperti yang terjadi hingga sekitar lima puluh tahun yang lalu di Belanda ketika jumlah Muslim masih sangat kecil. Sebagian besar dari kaum Muslim saat itu adalah orang-orang Maluku yang pernah bertugas menjadi tentara kolonial Belanda serta yang datang ke Belanda setelah berakhirnya Perang Dunia II dan Indonesia telah merdeka. Sebagai minoritas yang amat kecil, mereka tak dipandang sebagai ancaman. Toleransi dalam konteks ini gampang, terlebih jika Anda tinggal di daerah monokultural, di kawasan orang-orang kulit putih (seperti saya). Baru sejak 1960-an, kondisi mulai berubah berkat datangnya ratusan ribu Muslim dari Turki dan Maroko. Kini, kita dapat menjumpai masjid di semua kota besar di Belanda. Koran-koran Belanda menulis tentang isu-isu Islam setiap hari. Kehadiran Muslim tak bisa diabaikan.”(Koffeman, 2018).

Koffemann pada dasarnya memaksudkan toleransi itu pada konteks “disiplin gereja”, yang menekankan pentingnya keseimbangan “ketaatan” di satu sisi, dan “kebebasan” di sisi lain. Pada masa lalu, otoritas gereja begitu menekankan masalah ketaataan, sementara sekarang, telah mulai mempertimbangkan berbagai hal tentang kebebasan dan pandangan yang lebih inklusif.

“Dengan cara yang sama kita harus berbicara hari ini tentang perlunya toleransi yang ‘mahal’ di gereja. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan ketaatan dan kebebasan. Padahal, seabad yang lalu banyak gereja hampir tidak bisa mengakui nilai kebebasan di dalam gereja, mungkin sebaliknya yang terjadi sekarang, setidaknya di beberapa gereja di Eropa Barat. Saat ini, kita bergumul dengan masalah kepatuhan, dan karena itu disiplin” (Koffeman, 2016, hlm. 6)

Toleransi yang mahal mengandikan pengakuan akan kesetaraan, dan perlunya menganggap kesetaraan sebagai nilai intrinsik dalam toleransi. Selain itu, dan barangkali ini pengertian yang ketiga, bahwa toleransi yang mahal itu membutuhkan tingkat pengendalian diri dan ego yang lebih besar untuk tidak memaksakan pandangan sendiri dan menerima perbedaan pandangan orang lain.

“Toleransi yang mahal dalam gereja mengandaikan kesediaan untuk menerima satu sama lain sepenuhnya, sekalipun terdapat perbedaan etika dan doktrin yang mengakar. Toleransi yang mahal didasarkan pada pengakuan terhadap kesetaraan sebagai nilai di dalam dirinya sendiri, terlepas dari hubungan kekuasaan. Toleransi menjadi mahal karena menyiratkan adanya tingkat pengendalian diri (untuk menghormati orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda): Saya tidak selalu bisa memaksakan pandangan saya sesuatu apa yang saya inginkan” (Koffeman, 2016, hlm. 6).

Namun, menurut Koffemann, toleransi yang mahal tidak harus berarti toleransi yang “sangat mahal”, yakni toleransi yang dibangun di atas dominasi yang kuat terhadap kebebasan individual sebagaimana pandangan modern dalam liberalisme. Bagaimanapun, toleransi yang mahal tidak harus berarti melanggar batas-batas terkait aspek-aspek yang fundamental dalam keyakinan. Toleransi yang melampai batas dan terjebak dalam toleransi yang membabi-buta terkesan masuk ke dalam sikap yang relativistik dan tidak berpendirian:

“Tetapi toleransi yang mahal tidak berarti toleransi dengan segala cara. Persoalannya tentu bukan bahwa gereja harus secara tidak kritis mengadopsi pandangan liberal modern tentang kebebasan individu. Setiap komunitas agama memiliki hak dan kewajiban yang tidak dapat disangkal untuk membatasi toleransi sehubungan dengan pandangan dan praktik yang tidak sesuai dengan keyakinan utamanya. Di situlah politik gereja harus memainkan perannya. Jika kita mengakui apostolisitas Gereja, kita harus menjaga otentisitas pewartaan dan kesaksian gereja tempat kita berada, dan karena itu mengatur disiplin doktrinalnya, khususnya mengenai pelayan tertahbisnya. Dan jika kita mengakui kekudusan Gereja, kita harus menjaga keutuhan gereja yang menjadi tanggung jawab kita, dan karenanya mengatur disiplinnya mengenai gaya hidup (Koffeman, 2016, hlm. 7).

Bagi Koffemann, toleransi selalu berjalan dalam proses antara realitas dan doktrin ajaran normatif, dan merupakan upaya transformasi baik dalam diri individu maupun masyarakat.

“Dalam pandangan saya, itu termasuk apa yang saya sebut toleransi mahal di gereja, sebagai proses permanen komunikasi terbuka tentang kehidupan dan doktrin. Ini bukan masalah niat baik, ini bukan menggurui, dan ini tanpa syarat. Toleransi seperti itu menciptakan kondisi terbaik untuk latihan disiplin yang berharga.” (Koffeman, 2016, hlm. 7)

Terlepas dari makna historis dan konteks yang spesifik tentang “disiplin gereja” itu, *costly tolerance* memiliki makna implikatif yang lebih luas bagi trayek toleransi dan demokratisasi di luar gereja. Namun demikian, sebagai sikap moral, toleransi juga perlu diperkuat dengan rasa solidaritas dan komitmen moral terhadap perdamaian. Dalam konteks hubungan antar umat beragama, misalnya dalam Kauffman menuliskan:

“Toleransi adalah kunci bagi masyarakat multi-agama seperti Indonesia dan Belanda, meskipun toleransi menemukan ekspresi yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Namun, dari perspektif sejarah, kesamaan sejarah kolonial telah mempengaruhi kedua konteks tersebut. Misalnya, pandangan tradisional tentang Islam di Belanda dibentuk oleh pengalaman dan kajian dalam konteks kolonialisme dan misi, sedangkan kerangka hukum rezim kolonial berdampak pada masyarakat Indonesia.

Kedamaian dan keadilan dalam masyarakat yang demokratis hanya dapat tumbuh subur jika ada sikap toleransi antar umat beragama, baik dalam hal kepemimpinan maupun sesama umat beragama. Kebalikannya juga benar: toleransi saja tidak cukup, jika perdamaian, keadilan dan demokrasi tidak ada. Dengan kata lain, toleransi bukanlah nilai mutlak: ia memiliki keterbatasan, karena nilai-nilai lain semacam itu. Toleransi sejati itu mahal harganya; itu menyiratkan komitmen dan solidaritas” (Koffeman, 2018).

Dalam konteks masyarakat yang lebih luas, yang notabene adalah plural dan beragam, toleransi yang mahal, selain memerlukan pengendalian diri yang kuat, toleransi yang mahal juga mengandalkan atribut komitmen untuk menerima orang atau kelompok yang lain yang berbeda pandangan moralnya. Ia mengatakan perihal penerimaan toleransi (*acceptance of tolerance*):

“Masyarakat saat ini tidak lagi mampu membeli toleransi yang ‘murah’ dan tanpa komitmen. Itu harus belajar tentang mahalnya toleransi. Itulah yang membuat konferensi antaragama dan interkonteks di Yogyakarta tersebut menarik, baik bagi masyarakat Indonesia (negara Muslim terbesar di dunia dalam hal jumlah penduduk, tetapi dengan minoritas Kristen yang tidak bisa diabaikan) dan Belanda. Dalam konteks Belanda kami, toleransi yang mahal juga sangat penting, seperti di sebagian besar negara, saya kira – dan paling tidak di Afrika Selatan. Sekali lagi, itu mengandaikan kesediaan untuk menerima satu sama lain sepenuhnya, terlepas dari perbedaan pandangan dunia dan agama yang mengakar, selama perbedaan ini tidak mengarah pada kekerasan. Itu didasarkan pada pengakuan kesetaraan sebagai nilai itu sendiri, terlepas dari hubungan kekuasaan. Ini menyiratkan tingkat pengendalian diri, bukan karena takut akan pembalasan tetapi karena menghormati orang-orang dengan pandangan lain. Sayangnya, justru risiko pembalasan yang saat ini membebani wacana publik yang bebas tentang perlunya pengendalian diri” (Koffeman, 2016, hlm. 7).

Dalam penutupnya, Koffemann menuturkan sebuah pesan penutup terkait batas-batas toleransi:

“Toleransi mahal tidak berarti toleransi dengan segala cara. Ini berlaku dalam konteks kehidupan masyarakat. Setiap komunitas politik memiliki hak untuk membatasi toleransi sehubungan dengan pandangan dan praktik yang tidak sesuai dengan keyakinannya yang paling mendasar tentang kebebasan dan hukum. Untuk mengatakannya secara paradoks, bagian dari harga yang harus kita bayar untuk masyarakat yang toleran adalah kesediaan untuk tidak mentolerir intoleransi.” (Koffeman, 2016, hlm. 8).

Dengan demikian, penulis hendak mempertajam dan mempertegas beberapa hal terkait konsepsi toleransi yang mahal, sejauh mengacu kepada gagasan Leo Kofemann. Jadi, poin yang digaris bawahi disini adalah, bahwa toleransi

mengandaikan kualitas mental, pikiran, kesadaran, dan komitmen tertentu yang harus dibayar oleh seorang subjek toleransi untuk mengambil putusan menerima (acceptance) suatu perbedaan sikap atau pandangan moral (objection). Di tengah suasana ketika problem toleransi menjadi sorotan di Indonesia, apa yang dikatakan Koffemann itu rasional, bahwa: toleransi yang sejati itu memang tidaklah murah. Ia menuntut harga yang mahal. Terminologi “mahal” disini bukan istilah ekonomis-kuantitatif, melainkan lebih kualitatif, bahwa toleransi harus dibayar “ongkos mahal” dengan peningkatan kualitas, kesungguhan, keseriusan, komitmen, solidaritas, dan keadilan.

Dalam perspektif teori kritis, gagasan toleransi yang mahal merupakan konsepsi baru tentang toleransi yang mencoba rasionalisasi moralitas untuk meningkatkan kualitas dan signifikansi toleransi, agar relevan dengan tantangan situasi kehidupan yang plural dan majemuk. Dalam konteks toleransi beragama, gagasan ini benar-benar menjadi alternatif konseptual dan kontra-narasi terhadap tren konservatisme agama saat ini.

Lebih dari sekedar rekomendasi kepada “peningkatan kualitas toleransi”, *costly tolerance* juga, sampai batas tertentu, merupakan bentuk terobosan menuju “rasionalisasi” tindakan toleransi. Ditinjau dari elemen-elemen dasar toleransi, setidaknya yang dikemukakan oleh Koffemann, memiliki pokok pikiran lebih spesifik sebagai berikut:

Pertama, terkait elemen subjek toleransi (*subject of tolerance*) dan apa yang ditolak sebelum toleransi (*objection of tolerance*), *costly tolerance* mengandaikan seorang subjek yang berani dan sungguh-sungguh, tulus menyerukan toleransi, dan menolak model toleransi yang bersyarat (*conditional tolerance*), yang bersifat patronasif, dan dilakukan secara tidak sungguh-sungguh.

Kedua, terkait elemen penerimaan toleransi (*acceptance of tolerance*), sikap toleransi ditunjukkan dengan kesediaan untuk menerima secara tulus terhadap identitas dan keberadaan satu sama lain secara terbuka dan sepenuhnya, meskipun kelompok itu memiliki pandangan etis maupun doktrin-doktrin yang berbeda. *Costly tolerance* didasarkan pada pengakuan terhadap kesetaraan sebagai nilai intrinsik, menghargai kebebasan berbicara dan berpendapat.

Ketiga, terkait elemen batas-batas toleransi, *costly tolerance* berpandangan bahwa meskipun perlu penghargaan terhadap toleransi, tetapi ada kondisi-kondisi yang menuntut perlunya toleransi dibatasi manakala terkait dengan hal-hal fundamental di dalam keyakinan. Toleransi yang mahal tidak harus berarti melanggar batas-batas terkait aspek-aspek yang paling fundamental dalam keyakinan.

Keempat, terkait dengan rasionalitas toleransi, *costly tolerance* pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa toleransi perlu didasari dengan pemikiran yang otonom bahwa toleransi yang ditandai dengan pemahaman bahwa orang yang berbeda

pendapat akan memiliki kedudukan dan hak yang sama. *Costly tolerance* menolak karakter patronase dalam hubungan mayoritas dan minoritas, pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan berbicara dan berpendapat.

### **Toleransi sebagai *Virtue***

Pandangan Koffemann itu mengundang refleksi etis bahwa toleransi yang mahal merupakan tindakan moral individual yang tidak bisa dilepaskan dari kedisiplinan, pertimbangan moral keutamaan, sehingga bukan saja merupakan tindakan moral biasa (normal moral action), melainkan melihat toleransi sebagai sikap moral utama atau kebajikan (virtuous moral action) –dalam terminologi moral aristotelian. Toleransi menjadi berdaya manakala tumbuh sebagai karakter pribadi yang mengakar menjadi bagian dari disposisi keseharian dan kepribadian yang kuat dan stabil. Toleransi yang sejati mengandaikan pribadi-pribadi yang unggul dan berkarakter, berani mempertahankan keyakinan moral yang diyakini. Toleransi yang labil, ala kadarnya, dan dijalankan sekedar lip service dan tidak dilambiri karakter tidak akan berdaya ketika menghadapi suatu resiko, misalnya, derasnya ancaman dan resiko cacian dan makian dari kelompok intoleran.

Toleransi yang tangguh dan bermutu tidak akan lahir kecuali dari pribadi-pribadi yang tangguh dan bermutu pula (Balint, 2017, hlm. 25). Toleransi yang bermutu dengan modus toleransi yang utama seharusnya lahir bukan sekedar sebagai tindakan biasa yang seringkali tanpa didasari sikap dan motif yang lebih dalam untuk menjalin cinta kasih dan perdamaian. Tanpa dasar yang kokoh, toleransi hanya menghasilkan modus kepura-puraan. Toleransi sebagai kebajikan (virtue) mengandikan sikap toleran memang melekat dan terinternalisasi dengan baik menjadi watak, disposisi, dan kepribadian dalam diri seseorang secara kokoh dan betul-betul jujur dan mengerti dan menghayati: mengapa pilihan toleransi itu harus dilakukan dan tidak memaksakan pandangan dan pendapatnya kepada orang lain? Jika karakter toleran tersebut terbentuk, maka tindakan toleran yang dihasilkannya tentu, sebagaimana istilah Kauffmann, adalah toleransi yang bukan basa-basi, bukan pura-pura, melainkan sikap toleran yang benar-benar lahir dari niat yang tulus untuk “membiarkan” dan “menghormati”, bahkan, sampai batas tertentu, “menghargai” dan “menerima” pandangan moral orang lain yang berbeda .

*Costly tolerance* mengajarkan tidak mengobral toleransi dengan harga murah ketika orang tidak mau mengambil resiko apa-apa untuk menentukan suatu putusan moral, melainkan dengan ketulusan dan kesungguh-sungguhan, untuk menghasilkan toleransi yang benar-benar bermutu tinggi. Toleransi tidak dilakukan dengan asal-asalan, melainkan membutuhkan upaya yang serius baik pada tingkat “agen” maupun “struktur” sosial. Orang-orang yang humanis dan memperjuangkan nilai-nilai toleransi, seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, dan Buya Ahmad Syafii Maarif, terkadang harus membayar mahal dengan cacian, tuduhan,

fitnah, persekusi, dan sebagainya. Bahkan sebagaimana disebut oleh Kofemann, Bonhoeffer harus menjadi membayar dengan nyawa dan menjadi martir ketika memperjuangkan toleransi anti-genosida di masa rezim Nazi. Di dalam jiwa mereka terdapat “karakter” yang tangguh sehingga tidak gentar terhadap ancaman dan cacian.

Karakter, selain terbentuk karena kebiasaan dan pertimbangan moral yang mendalam, juga mengandaikan kedisiplinan dan keteguhan prinsip. Suatu sikap tindakan tidak disebut karakter manakala tidak bisa mempertahankan konsistensi. Sebagai contoh, seseorang disebut berkepribadian jujur manakala bisa mempertahankan sikap moralnya menjadi kebiasaan dan melekat (*embedded*) dalam diri, sehingga tidak inkonsisten karena hari ini jujur, esok hari berbohong, dan kembali jujur pada esoknya lagi. Itu menunjukkan karakter yang tidak konsisten dengan kejujuran, sehingga saya tidak layak untuk disebut orang yang jujur. Begitu pula suatu karakter toleran, membutuhkan konsistensi dan keteguhan hati untuk mempertahankan sikap tolerannya.

Karakter pribadi toleran juga erat kaitannya dengan kemampuan diri seseorang untuk melakukan pengendalian diri (*self-restraint*). Sebab, tindakan-tindakan intoleransi seringkali didasari oleh motif kebencian terhadap orang lain, yang mungkin karena perbedaan latar belakang kepercayaan, perbedaan persepsi tentang moral, perbedaan cara pandang terhadap suatu kebaikan, dan lain sebagainya, hingga termanifestasi menjadi aksi kekerasan tertentu. Konflik keagamaan yang seringkali berujung pada kekerasan, misalnya, karena melabeli kelompok berbeda agama atau berbeda cara penafsiran agama sebagai “heterodoks”, “melenceng dari kebenaran” dan “sesat”, bahkan “kafir”, sehingga layak untuk dibenci dan dikucilkan, bahkan pada tataran yang ekstrim layak untuk dihilangkan nyawanya.

Sebagaimana pandangan Reiner Forst (2013), toleransi selalu terkait dengan kemampuan “relativisasi pandangan diri” seseorang untuk memberikan ruang bagi kebenaran yang diklaim orang lain. Alih-alih memaksakan pandangan diri, pengendalian diri menjadi sifat dasar yang vital untuk melahirkan sikap toleransi, karena dengan mengendalikan emosi, persepsi, pikiran, dan hasrat, orang yang mampu mengendalikan diri tentu tidak akan memaksakan persepsi dan keyakinan, dan akan sanggup menerima perbedaan. Terlebih ia akan menolak untuk melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap orang lain. Pribadi yang toleran mampu membatasi kebebasan individu sendiri agar tidak melakukan apa yang mestinya dapat dilakukan, tetapi memilih untuk tidak melakukan hal itu kepada orang lain, apalagi jika dilakukan secara sewenang-wenang, demi menghargai kebebasan dan kesetaraan orang lain dan segala perbedaan identitas dan preferensi yang ada dalam diri orang lain tersebut (Forst, 2013).

Agar menjadi seorang yang berkarakter toleran yang mantab, tentu

membutuhkan latihan, pendewasaan, pembelajaran, dan proses pendidikan. Apabila diri seseorang memiliki karakter toleran yang sudah mantab, maka dalam kondisi apapun ia juga akan sulit terombang-ambing oleh provokasi dan pengaruh yang mengarah kepada intoleransi dan diskriminasi. Ia akan menimbang dengan baik, dengan pertimbangan keadilan dan kebijaksanaan yang dimiliki, dan tidak menuruti hawa nafsunya untuk menumbuhkan amarahnya kepada orang lain. Sebaliknya, ia akan selalu mengajak kepada jalan kedamaian dan menghindari jalan kerusakan. Dengan demikian, antara pengendalian diri dan intoleransi kiranya sulit dipisahkan

### **Implikasi *Costly tolerance* dalam Politik**

Dalam pengertian yang lain, apa yang dikemukakan Koffemann adalah ajakan untuk melampaui toleransi yang semu, dan menaiki level toleransi yang lebih tinggi, tetapi tidak harus terjebak dalam relativisme pandangan moral. Toleransi yang dibutuhkan adalah yang memiliki bobot moral yang lebih tinggi (Setyabudi, 2020a). Secara lebih luas, *costliness* memiliki implikasi yang lebih spesifik terhadap konsepsi toleransi dalam kehidupan politik kewargaan. Dalam konteks yang lebih luas dari sekedar teologis, *costly tolerance* relevan dengan beberapa pengertian dan pemahaman mengenai konteks toleransi politik yang memungkinkan relasi sosial dan politik yang dianggap toleran terjadi di dalamnya:

*Pertama*, toleransi seringkali diartikan secara dangkal sebagai “pemberian otoritas” dalam konteks relasi vertikal hubungan mayoritas dan minoritas sebagai “*permissio negativa mali*”, dalam konteks ini, toleransi dianggap sebagai langkah “*permission*” mayoritas sebagai subjek toleran terhadap minoritas sebagai objek toleran. Meskipun, bagi Forst, “*this form of toleration is the least costly of all possible alternatives*” [bentuk toleransi ini adalah yang paling murah dari semua alternatif yang mungkin] (Forts, 2007).

Jika toleransi diartikan dalam konteks tersebut, *costly tolerance* relevan dalam konteks melawan dominasi mayoritarianisme. Sebab, hubungan mayoritas dan minoritas agama di Indonesia masih mengundang beragam persoalan karena dominasi ini. Sebagai contoh adalah apa yang dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia yang belum mendapatkan perlakuan yang semestinya. Dalam kasus administratif penulisan identitas KTP, misalnya, meskipun sudah ada keputusan konstitusional yang memperbolehkan pencantuman identitas “kepercayaan”, tetapi kelompok kepercayaan masih mengalami pembatasan, yang berimbas pada pembatasan hak-hak dasar sebagai minoritas, seperti pendidikan dan pengajaran. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai “subyek toleransi” memberikan “permisi” dan “otoritas” yang lebih tinggi, dan pemerintah sebagai representasi mayoritas “harus membayar ongkos yang lebih mahal” untuk menyelesaikan persoalan ini, dan memberikan “perhatian” yang lebih tinggi.

*Kedua*, dalam konteks relasi horisontal dimana toleransi berlaku sebagai “modus vivendi” koeksistensi bagi dua kelompok yang memiliki kesetaraan otoritas politik untuk menghindari konflik dan menjalin perdamaian. Toleransi ini terjalin dalam “salah satu kelompok yang kira-kira memiliki kekuatan yang sama, dan yang melihat bahwa demi perdamaian sosial dan mengejar kepentingan mereka sendiri, saling toleransi adalah yang terbaik dari semua alternatif yang mungkin” (Forts, 2007). Dalam model ini, subjek toleransi sekaligus sebagai objek toleransi.

Jika toleransi dimaknai dalam konteks tersebut, maka *costly tolerance* memiliki relevansi strategis untuk berani menolak konflik dan mewujudkan perdamaian. Sebagai contoh, dalam banyak kasus yang sering terjadi adalah terkait hubungan kelompok Sunni dan Syi’ah maupun Ahmadiyah di Indonesia, yang sampai berujung kekerasan. Kehidupan dua kelompok dalam agama ini seringkali berujung pada konflik, sebagaimana kekerasan yang pernah terjadi di Sampang yang berujung pada pengusiran. Tindakan serupa dialami oleh kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang ada di Lombok. Implikasi dari *costly tolerance* adalah perlunya upaya sungguh-sungguh untuk mencari strategi “koeksistensi”, seperti, misalnya, menerima “rekonsiliasi” bagi kedua belah pihak yang bertikai, tanpa harus membawa serta klaim kebenaran mengenai kebenaran doktrin teologis masing-masing.

*Ketiga*, dalam konteks relasi komunal dan individual, toleransi dimaknai sebagai “saling sikap hormat” terhadap perbedaan dan liyan, “mutual respect”, meskipun dua kelompok mempunyai keyakinan etis mengenai kebaikan, kepercayaan, praktik budaya yang berbeda, tetapi mereka saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana dikatakan Forst, ‘pihak-pihak yang bertoleransi menghormati satu sama lain dalam arti yang lebih timbal balik ... Meskipun pada dasarnya mereka berbeda dalam keyakinan etis mereka tentang cara hidup yang baik dan benar dan dalam praktik budaya mereka, warga negara mengakui satu sama lain sebagai moral-politik yang setara dalam arti bahwa kerangka umum kehidupan sosial mereka harus—sejauh menyangkut pertanyaan mendasar tentang hak dan kebebasan dan distribusi sumber daya—dipandu oleh norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak secara setara dan yang tidak mendukung satu komunitas etika atau budaya tertentu.’ (Forst, 2007).

Jika toleransi dimaknai sebagai “sikap respek” dalam konteks masyarakat yang beragam, *costly tolerance* mendukung “penghormatan” dan “penghargaan” yang lebih sungguh-sungguh terhadap kelompok yang berbeda, baik dari sisi keyakinan, pandangan etis, maupun praktik budaya, bukan saja secara formal, tetapi juga secara kualitatif. Perlunya penghargaan secara kualitatif tersebut adalah agar mampu menghargai dan menghormati bahwa pandangan-pandangan dan keyakinan-keyakinan moral yang berbeda itu memang perlu bagi penganutnya sendiri, dan kalau perlu, di samping memberikan kebebasan kepada mereka,

struktur sosial dan hukum yang ada juga harus memberikan eksepsi atau pengecualian kepada mereka jika memang itu diperlukan, selama ada pembatasan-pembatasan tertentu secara timbal balik.

*Keempat*, dalam konteks multikultural dan pengakuan terhadap identitas, toleransi pada tingkat yang lebih tinggi dimaknai sebagai sikap saling menerima, mengakui dan menghargai, “*mutual recognition*”, sesuatu yang lebih serius dan mendalam daripada sekedar “sikap menghormati”. Konsepsi ini sebagaimana dinyatakan Forst adalah sebuah: ‘Pengertian saling pengakuan antar warga negara dibandingkan dengan konsepsi hormat. Di sini, bersikap toleran tidak hanya berarti menghormati anggota dari komunitas budaya atau agama lain sebagai sederajat secara moral dan politik, tetapi juga berarti memiliki semacam penghargaan etis yang mendalam terhadap keyakinan mereka, yaitu menganggap mereka sebagai konsepsi yang berharga secara etis—bahkan meskipun berbeda dari milik kita sendiri— dan dalam beberapa hal menarik secara etis dan dapat dipegang dengan alasan yang baik.... yaitu, semacam penerimaan positif terhadap keyakinan yang karena alasan tertentu, meskipun Anda masih merasa tidak semenarik yang Anda miliki sendiri. Betapapun berharganya bagian dari keyakinan yang ditoleransi, itu juga memiliki bagian lain yang menurut Anda salah’ (Forst, 2007)

Dalam konteks ini, sebagaimana konsepsi di atas, *costly tolerance* pada dasarnya juga menuntut kesediaan secara tulus untuk menerima identitas dan keberadaan satu sama lain secara terbuka, dengan tanpa menyalahkan sepenuhnya, meskipun kelompok itu memiliki pandangan etis maupun doktrin-doktrin yang berbeda secara fundamental. *Costly tolerance* didasarkan pada pengakuan terhadap kesetaraan sebagai nilai intrinsik, menghargai kebebasan berbicara dan berpendapat. Toleransi sampai pada tingkat ini adalah toleransi yang melampaui inklusivitas, yakni sikap pluralis, yang berani meyakini, sampai batas tertentu, bahwa ajaran atau kepercayaan komunitas yang lain mengandung kebenaran. Namun bagaimanapun, toleransi yang pluralis ini tidak sama dari sikap relativisme yang menunjukkan sikap lebih skeptis terhadap kebenaran. Barangkali, ini adalah “toleransi yang paling mahal”.

### **Toleransi Masih Terlalu Murah di Indonesia?**

Sekalipun versi pemerintah mengatakan indeks toleransi agama di Indonesia semakin meningkat, tetapi gambaran kuantitatif itu perlu diverifikasi pada level mikro dan kualitatif (Zanakis, Newburry, & Taras, 2016). Bahkan di beberapa daerah yang dikatakan sebagai lumbung toleransi sekalipun, kita masih mendapati beberapa “toleransi semu” atau malah tendensi intoleransi dalam kehidupan antar atau inter-umat beragama, bahkan persepsi terbalik yang menganggap intoleransi justru sebagai kebajikan (Burhani, 2019). Banyak sekali tantangan yang dihadapi terkait aksi intoleransi, yang berdampak terhadap persekusi terhadap kelompok

minoritas agama, pelarangan beribadah, pengrusakan tempat ibadah, pelarangan pendirian rumah ibadah, diskriminasi terhadap penganut kepercayaan, dan lain sebagainya. Nasib politik yang muram masih dirasakan kelompok minoritas agama atau minoritas dalam suatu agama, semisal komunitas Ahmadiyah, Syi'ah, penghayat kepercayaan, akibat beberapa persekusi tanpa penegakan hukum dan sampai sekarang belum dapat menemukan jalan penyelesaian (Burhani, 2021).

Judul artikel ini mungkin sepiantas lalu mengesankan pesimisme. Tetapi sebenarnya penulis ingin mendorong optimisme dan harapan, sebagaimana nuansa yang dirasakan dalam kegiatan NICMR (2019), bahwa ada beberapa signifikansi dari agenda *costly tolerance*, khususnya bagi kepentingan hubungan antaragama dan antarbudaya di Indonesia. Signifikansi artinya pesan moral praktis yang mungkin dapat diambil dari suatu ide dan menjawab tantangan kontekstual masa kini. Hal ini menunjukkan langkah apa saja yang harus diupayakan secara lebih serius untuk meningkatkan kualitas toleransi agama. Terlepas dari kesan konsep ini yang lebih individualistik dan elitis bahwa hanya segelintir orang saja yang akan mampu membayar mahal sebuah toleransi, setidaknya ada empat hal signifikan dari agenda *costly tolerance* bagi hubungan social dan politik agama yang lebih toleran.

*Pertama*, membangun kesadaran tentang agen-agen toleransi yang percaya diri dan matang untuk memperkuat toleransi melalui keteladanan di ruang-ruang publik, terlebih mampu duduk dalam legislasi. Penguatan toleransi agama perlu didukung dengan kaderisasi untuk menciptakan individu-individu sebagai duta toleransi dan agen perubahan di masa depan untuk menyuarakan toleransi yang lebih bermutu.

*Kedua*, memperkuat dan meningkatkan komunikasi antar-iman. *Costly tolerance* merupakan reaksi langsung dari suatu bentuk konservatisme atau kecenderungan tertutup dan tidak toleran dalam pemahaman teologis. Gejala seperti ini tidak hanya dialami dalam sejarah Kristiani, tetapi juga dijumpai dalam tradisi Islam, dan kiranya, agama-agama yang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan komunikasi dan pemahaman bersama tentang pentingnya toleransi dalam bentuk komunikasi lintas iman untuk menghindari kejumudan dalam pemahaman teologis, khususnya menghadapi gejala fundamentalisme, takfirisme. Dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah usaha yang lebih serius dalam hal komunikasi antar pemeluk agama, sehingga mampu memperkenalkan dan mempelajari keunikan teologis di dalam masing-masing agama.

*Ketiga*, memperkuat kesadaran koeksistensi (baca: kerukunan). Meski merupakan modus toleransi yang minimal, kerukunan tetaplah dibutuhkan. Salah satu gejala yang perlu diantisipasi dalam membangun kerukunan dalam kemajemukan adalah pandangan eksklusivisme, yang menjadikan kehidupan keagamaan dan kebudayaan saling eksklusif, tidak mau bertetangga, bekerjasama,

dan menutup diri satu sama lain. Blok social ini harus dibongkar dengan sikap dan wacana inklusivisme, dan upaya yang lebih serius untuk menemukan visi bersama mengenai perdamaian untuk saling menyapa dalam keharmonisan. *Costly tolerance* dapat dilihat sebagai sebuah upaya mendorong kepada kerjasama atau mempromosikan kerjasama dan perdamaian atau ko-eksistensi atau bahkan pro-eksistensi.

*Keempat*, mempromosikan dialog bagi rekonsiliasi konflik agama. Konflik keagamaan –dalam beragam tingkat dan manifestasinya, baik dalam internal keagamaan atau antar-agama seringkali terjadi. Salah satu kegiatan *costly tolerance* yang penulis pernah ikuti adalah upaya “dialog lintas iman” (*interfaith dialogue*), dan itu pula yang dilakukan dalam agenda-agenda konsorsium NICMCR. Toleransi berbasis dialog diperlukan khususnya sebagai instrumen untuk mengurai dan menyelesaikan konflik-konflik keagamaan. Dialog antar-agama masih menjadi instrumen penting, dan dianggap sebagai tantangan baru bagi hubungan agama di Indonesia-Belanda. Salah satu tesis penting yang dihasilkan dari kegiatan *interfaith* adalah: bahwa “kehidupan demokrasi dan inklusivitas social dapat dibangun melalui upaya dialog yang intensif”.

*Kelima*, memperluas harmoni bukan saja antara Muslim-Kristen, tetapi juga bagi komunitas masyarakat agama-agama lebih luas. Meskipun ide *costly tolerance* disemaikan dalam konteks hubungan antara kaum Muslim dan Kristen khususnya di Indonesia dan Belanda, akan tetapi pada dasarnya ide-ide pokok dalam konsep ini relevan untuk diperluas, bukan saja hubungan antara Muslim dan Kristen, tetapi juga hubungan antar-agama-agama secara terbuka dan egaliter. Prinsipnya adalah dibutuhkan upaya yang lebih serius dan lebih sungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian antar pemeluk agama di manapun.

## **Kesimpulan**

Ide *costly tolerance* merupakan gagasan kritis tentang perlunya mewujudkan toleransi yang bermutu. Istilah “*costly*” yang disematkan dalam toleransi dapat mengimplikasikan peningkatan kualitas toleransi melalui kesadaran individual. Gagasan ini muncul dalam konteks teologis yang individualistik, akan tetapi, ia juga relevan untuk konteks sosial dan politik. Kita tidak akan dibenarkan secara moral membangun toleransi melalui pemaksaan, yang akan menjebak subjek ke dalam relasi toleransi represif (*repressive tolerance*) atau justru membawa ke dalam intoleransi dalam bentuk yang lain. Toleransi seyogyanya muncul dari pertimbangan hati nurani, kesadaran dan ketulusan yang mengakar, dan orang akan berani membayar mahal untuk mempertahankan sikap dan pertimbangan moralnya itu. Toleransi yang otentik, matang, berkualitas, tidak hanya berorientasi pada tindakan moral biasa *an-sich*, tetapi harus dibangun di atas fondasi karakter, sehingga toleransi tidak dipandang bukan hanya keutamaan atributif semata, tetapi

merupakan kebijaksanaan muncul dari panggilan hati yang terdalam yang otentik. Untuk mewujudkannya, perlu kedisiplinan dan kesadaran. Toleransi sebagai disposisi erat kaitannya dengan pengendalian diri dan disiplin. Toleransi tidak akan menjadi cukup solutif bagi problem sosial sepanjang tidak dimaknai sebagai “kebajikan”, sebagai bagian dari karakter (being) yang melekat dalam diri manusia, agar dapat teragregasi menjadi komunitas masyarakat yang toleran. Selain itu, ada beberapa pesan moral yang dapat diambil dari agenda *costly tolerance* dalam konteks inter-kultural dan inter-religius, yakni perlunya meningkatkan kualitas komunikasi antar-iman, meningkatkan kesadaran pentingnya koeksistensi damai, memperkuat dialog bagi perdamaian dan rekonsiliasi konflik, dan mendukung harmoni agama-agama yang lebih luas lagi.

## Daftar Pustaka

- Balint, P. (2017). *Respecting Toleration: Traditional Liberalism and Contemporary Diversity*. Oxford, United Kingdom ; New York, NY: OUP Oxford.
- Burhani, A. N. (2019). *Menemani Minoritas: Paradigma Islam tentang Pembelaan terhadap yang Lemah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhani, A. N. (2021). “It’s a Jihad”: Justifying Violence towards the Ahmadiyya in Indonesia. 9(1), 99–112. <https://doi.org/10.1017/trn.2020.8>
- Forst, R. (2013). *Toleration in Conflict: Past and Present*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.
- Koffeman, L. (2016). *Costly tolerance*. HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 72(1), 8. <https://doi.org/10.4102/hts.v72i1.3282>
- Koffeman, L. (2018, Juli 16). What makes tolerance costly? Diambil 23 Januari 2023, dari <https://crs.ugm.ac.id> website: <https://crs.ugm.ac.id/what-makes-tolerance-costly/>
- Ma’arif, A. S. (2022). *Al-Quran untuk Tuhan atau untuk Manusia?* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Macedo, S. (2017). Toleration. Dalam R. E. Goodin, P. Pettit, & T. Pogge (Ed.), *A Companion to Contemporary Political Philosophy* (hlm. 813–820). New Jersey, United States: John Wiley & Sons, Ltd. <https://doi.org/10.1002/9781405177245.ch51>
- Marcuse, H. (1997). *Repressive Tolerance*. Dalam R. P. Wolff (Ed.), *A Critique of Pure Tolerance* (Reprint, 1970 edition). Boston: Beacon Pr.
- Setyabudi, M. N. P. (2020a). KONSEP DAN MATRA KONSEPSI TOLERANSI DALAM PEMIKIRAN RAINER FORST. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 81–94. <https://doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24895>
- Setyabudi, M. N. P. (2020b). Toleransi: Dari Pengalaman Sejarah Menuju Konstruksi Teoritis. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 2(1),

103–111. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2018.002.01.8>

Sugiharto, B. (2017). Toleransi dan Batas-Batasnya. Dalam H. K. Kewuel, A. Budiyanto, Y. Fajar, & N. B. Kumoro (Ed.), *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-Batas Toleransi*. Malang: Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.

Zanakis, S. H., Newburry, W., & Taras, V. (2016). Global Social Tolerance Index and multi-method country rankings sensitivity. *Journal of International Business Studies*, 47(4), 480–497. <https://doi.org/10.1057/jibs.2016.5>